

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening antara dewan direksi wanita sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen dari perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 (Monica et al., 2021). Temuan menunjukkan bahwa dewan direksi wanita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon serta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena wanita lebih memprioritaskan kualitas hidup dengan mengambil peran dalam mengelola aktivitas perusahaan daripada mengelola aset dan kewajiban. Selain itu, pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini berhasil menjadi pemediasi antara dewan direksi wanita dan nilai perusahaan.

Penelitian Al-Qahtani & Elgharbawy (2020) terkait keragaman dewan direksi dengan pengungkapan informasi gas rumah kaca yang diukur menggunakan skor *Carbon Disclosure Project* (CDP) dari perusahaan Inggris yang terdaftar dalam indeks UK FTSE 350 tahun 2017. Keragaman dewan direksi sebagai variabel independen diproksikan dengan keragaman gender, masa jabatan, dan keahlian dewan direksi. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan wanita di dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi gas rumah kaca. Hal ini karena dapat memberikan jalan tengah bagi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan tujuan keuangan dan non keuangan. Kemudian, keahlian dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap

pengungkapan informasi gas rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi dengan keahlian keuangan mungkin tidak terlalu tertarik pada isu-isu sosial dan lingkungan. Masa jabatan dewan direksi tidak mempengaruhi pengungkapan informasi gas rumah kaca, dengan kata lain masa jabatan yang pendek atau panjang tidak mempengaruhi pengungkapan gas rumah kaca.

Penelitian M. Kolic (2018) terkait tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon dari perusahaan Turki yang terdaftar di Bursa Istanbul (BIST) tahun 2011-2015. Tata kelola perusahaan sebagai variabel independen diprosikan dengan karakteristik dewan direksi dan komite keberlanjutan. Karakteristik dewan direksi berupa ukuran, independensi, keragaman gender, dan kebangsaan dewan direksi. Temuan menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan keragaman gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, karena jumlah direksi tidak memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pengungkapan emisi karbon dan disebabkan oleh rendahnya proporsi wanita di dewan perusahaan Turki. Berbeda dengan hasil direktur independen dan komite keberlanjutan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sebab jumlah direktur independen yang besar dan terdapat keberadaan komite keberlanjutan maka perusahaan lebih mungkin untuk melakukan pengungkapan terkait emisi karbon.

Penelitian Tingbani et al. (2020) terkait keragaman gender dewan direksi dan komite lingkungan terhadap pengungkapan gas rumah kaca dari perusahaan Inggris yang diperdagangkan di LSE dan terdaftar dalam indeks UK FTSE 350 tahun 2011-2014. Keragaman gender dewan direksi dan komite lingkungan sebagai variabel independen. Temuan menunjukkan bahwa keragaman gender dewan direksi

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan gas rumah kaca, yang artinya kehadiran wanita di dalam ruang rapat dapat memberikan pendapat penting bagi pertentangan yang sedang berlangsung. Sedangkan kehadiran komite lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela gas rumah kaca, sebab kemungkinan perusahaan tidak secara langsung menghubungkan mekanisme tata kelola yang relevan dengan keputusan dan praktik pengungkapan mereka.

Penelitian Hollindale et al. (2017) terkait kehadiran wanita di dewan terhadap pengungkapan gas rumah kaca dari perusahaan Australia yang terdaftar di Bursa Efek Australia tahun 2007. Dewan direksi wanita sebagai variabel independen. Temuan menunjukkan bahwa dewan direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Perusahaan dengan lebih banyak wanita di dewan mereka memiliki kuantitas dan kualitas pengungkapan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi.

Penelitian Zhu et al. (2022) terkait peran dualitas CEO sebagai pemoderasi dewan direksi wanita dan CEO wanita terhadap kinerja keberlanjutan dari perusahaan non keuangan di Pakistan tahun 2005-2020 (Zhu et al., 2022). Dewan direksi wanita dan CEO wanita sebagai variabel independen. Temuan menunjukkan bahwa dewan direksi wanita dan CEO wanita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan, sebab wanita yang menduduki posisi di tingkat manajemen atas dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih baik, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Sedangkan dualitas CEO tidak memoderasi hubungan ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi beranggapan bahwa perusahaan dan masyarakat berperan dalam kontrak sosial, sehingga perusahaan harus meyakinkan publik terkait kegiatan bisnis mereka untuk dapat memenuhi standar legitimasi (Tingbani et al., 2020).

Teori legitimasi menjelaskan keterkaitan antara perusahaan dan lingkungan sosial melalui kebijakan pemerintah (Ummah & Setiawan, 2021), yang artinya ketika perusahaan sudah menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai peraturan yang berlaku maka perusahaan berharap mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Tingbani et al. (2020) mendefinisikan legitimasi sebagai perilaku perusahaan yang diharapkan, pantas, atau sesuai dengan beberapa sistem norma serta nilai kepercayaan yang dibangun secara sosial. Teori legitimasi menunjukkan bahwa organisasi dapat melegitimasi aktivitasnya dengan memastikan kalau sistem nilainya sesuai dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas, tetapi legitimasi organisasi akan terancam apabila terdapat konflik diantara kedua sistem nilai tersebut (Elmagrhi et al., 2019).

Teori ini menjadi jembatan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat serta sebagai dorongan perusahaan untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan dan akhirnya mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Ummah & Setiawan (2021) menyatakan bahwa untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi menjadi motivasi penting bagi perusahaan yang membuat pengungkapan sukarela (Hollindale et al., 2017).

Teori legitimasi berfokus pada keragaman gender dewan direksi dan kinerja lingkungan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat luas atas keputusan yang dibuat, dengan harapan kemungkinan keberlanjutan perusahaan tetap terjaga (Tingbani et al., 2020). Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dan penerimaan sosial dari masyarakat dengan memilih lebih banyak wanita ke dalam dewan mereka, yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan (Elmagrhi et al., 2019).

Salah satu cara perusahaan mendapatkan legitimasi serta pengakuan dari publik dan pemangku kepentingan yaitu dengan melakukan pengungkapan keberlanjutan termasuk pengungkapan lingkungan (Allam & Diyanty, 2020). Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat di sekitar tempat perusahaan berdiri dan memaksimalkan aset keuangan perusahaan dalam jangka panjang (Nasih et al., 2019).

Perusahaan menanggapi tekanan dari para pemangku kepentingan dengan mengalihkan kegiatan operasional mereka menjadi sebuah pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan dan keberlanjutan. Tanggapan tersebut diharapkan memiliki dampak positif bagi perusahaan, sebab dapat meningkatkan legitimasi dari pemangku kepentingan dan memperoleh beberapa manfaat lainnya seperti meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan kegiatan operasional (Muhammad & Aryani, 2021). Apabila perusahaan tidak bisa melaksanakan sesuai nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terancam dan akhirnya perusahaan akan melaksanakan tindakan tertentu untuk

mencapai legitimasi masyarakat dengan tujuan menghilangkan ancaman tersebut (Iriyadi & Antonio, 2021).

2.2.2 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan menjelaskan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab (Ummah & Setiawan, 2021). Teori ini juga menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi harapan pemangku kepentingan (Astari et al., 2020). Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi namun juga keuntungan pemangku kepentingan (Monica et al., 2021). Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa suatu perusahaan mencoba untuk menyeimbangkan kegiatan operasionalnya dengan harapan pemangku kepentingan (M. Kolic, 2018). Maka dari itu, teori ini memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Khan et al., 2021).

Teori pemangku kepentingan mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi lingkungan untuk meminimalkan tekanan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020). Tekanan eksternal dari beberapa kelompok pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media dan komunitas lokal, cenderung terus meningkat dari sisi lingkungan dan sosial (M. Kolic, 2018). Perusahaan memperoleh tekanan dari pemangku kepentingan untuk mengungkapkan informasi terkait kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi perubahan iklim (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020; Ahzar, 2018; Nathalia & Setiawan, 2022). Tekanan pemangku kepentingan dianggap lebih berpengaruh pada sikap manajer dalam mengendalikan masalah sosial dan lingkungan (Astari et al., 2020).

Hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus tetap terjaga, salah satu caranya yaitu dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang menyajikan informasi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi sebuah perusahaan kepada pemangku kepentingan (Ummah & Setiawan, 2021). Salah satu bagian dari laporan keberlanjutan adalah pengungkapan emisi karbon yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan. Pengungkapan emisi karbon bisa menjaga hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, sebab sebagai tanda komitmen dan kepedulian terhadap masalah lingkungan (Monica et al., 2021).

Monica et al. (2021) menyatakan bahwa informasi pengungkapan emisi karbon dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memahami nilai, kebijakan, dan motif perusahaan untuk menangani emisi karbon yang dihasilkan. Salah satu pemangku kepentingan yakni investor, yang ingin mengetahui bagaimana perusahaan mengevaluasi risiko, dampak finansial, dan apakah terdapat sistem pengendalian terkait emisi karbon (Nathalia & Setiawan, 2022). Kreditur juga mempertimbangkan informasi terkait isu lingkungan untuk mengambil keputusan pendanaan (Kim et al., 2021). Dewan yang efektif akan berupaya mengurangi risiko perubahan iklim dan menanggapi harapan pemangku kepentingan dengan meningkatkan pengungkapan terkait perubahan iklim (Nathalia & Setiawan, 2022). Oleh karena itu, pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

2.3 Telaah Literatur

2.3.1 Pengungkapan Emisi Karbon

Emisi karbon terbagi menjadi dua, yaitu emisi karbon alami dan emisi karbon industri (Allam & Diyanty, 2020). Tanaman dan laut menetralkan emisi karbon yang berasal dari siklus bumi sehingga disebut emisi karbon alami, sedangkan emisi karbon yang berasal dari kegiatan manusia disebut emisi karbon industri, dapat menyebabkan karbon dioksida lebih padat dan tidak dapat diserap oleh bumi (Kurnia et al., 2021). Aktivitas manusia yang mengeluarkan emisi karbon berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, serta gas alam untuk menghasilkan energi dan listrik (Allam & Diyanty, 2020).

Industri bisnis yang melakukan pembakaran bahan bakar fosil secara intensif adalah industri manufaktur dan pertambangan serta industri pertanian yang memiliki tingkat emisi gas metana (CH_4) yang tinggi dimana gas tersebut lebih berbahaya dari gas karbon (Allam & Diyanty, 2020). Hal ini menandakan bahwa industri berdampak besar pada emisi karbon, karena aktivitas operasional tidak hanya menghasilkan karbon dioksida namun juga gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Rahmadhani (2019) mengatakan bahwa pengungkapan emisi karbon dibutuhkan untuk mengendalikan emisi karbon dari industri.

Perusahaan mempertanggungjawabkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dengan tujuan menambah nilai perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon (Rahmadhani, 2019). Semakin besar kepentingan *stakeholder* dalam perubahan iklim maka semakin besar pula jumlah perusahaan pelapor dalam industri yang sama sehingga semakin akurat informasi terkait emisi karbon serta

dapat diandalkan oleh pasar, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa informasi yang dilaporkan kepada *Carbon Disclosure Project* memiliki reliabilitas yang tinggi meskipun bersifat sukarela (Kim et al., 2021). Keterbukaan informasi mengenai emisi karbon oleh perusahaan menjadi salah satu kontribusi perusahaan terhadap pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim (Rahmadhani, 2019). Pengungkapan emisi karbon dapat dilaporkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan (Kurnia et al., 2021).

Pengungkapan emisi karbon termasuk jenis pengungkapan lingkungan yang termuat dalam paragraf keempat belas PSAK No.1 (revisi 2016) mengenai penyajian laporan keuangan :

“Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK”.

Peraturan lebih lanjut terkait pengungkapan emisi karbon secara sukarela belum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi analisa pengungkapan emisi karbon tertuang dalam laporan keberlanjutan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2.3.2 Dewan Direksi Wanita

Dewan direksi merupakan elemen yang paling berpengaruh dalam suatu perusahaan, sebab menentukan arah kebijakan perusahaan (Wang et al., 2021). Dewan direksi dapat dipandang sebagai mekanisme legitimasi dan reputasi, sebab memiliki peran untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien (Mallin & Michelin, 2011). Peran dan tanggung jawab direksi yang pertama yaitu

tidak hanya terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia tetapi juga untuk menciptakan nilai dengan mengikuti aturan dan kode etik perusahaan, peran yang kedua yaitu terkait pengambilan keputusan sebab mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk entitas perusahaan (Wang et al., 2021).

Seiring pertumbuhan ekonomi, wanita memainkan peran yang semakin penting dalam tata kelola perusahaan sehingga proporsi wanita di dewan direksi perusahaan semakin meningkat (Z. Liao & Wang, 2018). Wanita lebih sensitif terhadap masyarakat, lingkungan, dan etika serta lebih memperhatikan kegiatan sukarela (Dwekat et al., 2020). Ciri – ciri wanita cenderung lebih berorientasi pada aspek kehidupan karena naluri keibuan yang melekat pada diri seorang wanita memberikan kontribusinya tidak hanya untuk perusahaan tetapi untuk generasi yang akan datang (Monica et al., 2021).

Dasar yang menjadi pembeda pola pikir antara pria dan wanita yaitu terletak pada perbedaan emosional dan intelektual, dimana pria dengan sifat maskulinnya mempunyai ciri sifat mandiri, rasional, dan kompetitif, sedangkan wanita dengan sifat feminimnya mempunyai ciri sifat mengayomi, penuh perhatian, sensitif, dan mengandalkan intuisi (Wei et al., 2017). Hal tersebut menyebabkan pendekatan setiap keputusan yang diambil antara pria dan wanita berbeda serta menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan masing-masing anggota dewan, sebab memiliki perilaku dasar yang menyebabkan perbedaan dalam memandang suatu masalah dan cara penyelesaiannya.

2.3.3 Komite Keberlanjutan

Komite keberlanjutan/CSR/lingkungan ialah sub komite dewan direksi yang membawahi pelaksanaan CSR dan agenda keberlanjutan yang dapat mempengaruhi pengungkapan perusahaan (Qaderi et al., 2022). Birindelli et al. (2018) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan yang telah memutuskan untuk membentuk komite keberlanjutan atau CSR untuk menangani berbagai isu keberlanjutan. Kemudian, Tingbani et al. (2020) juga menyatakan bahwa perusahaan menunjuk komite khusus untuk mengatasi masalah utama lingkungan, yang terkait dengan perencanaan dan operasional strategis mereka.

Kehadiran komite keberlanjutan memainkan peran penting dalam memprioritaskan isu-isu terkait lingkungan serta bertindak sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja manajemen yang bertanggung jawab secara sosial (Martínez-Ferrero et al., 2020). Komite keberlanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan serta menunjukkan komitmen dan orientasi dewan terhadap pembangunan keberlanjutan (Hussain et al., 2018). Sebuah perusahaan yang membentuk komite keberlanjutan tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadikannya sebagai strategi utama dalam keberlanjutan (Birindelli et al., 2018).

Pembentukan komite keberlanjutan dalam suatu perusahaan merupakan indikasi penting untuk terlibat dalam masalah lingkungan dan perubahan iklim (Tingbani et al., 2020). Melalui komite keberlanjutan, perusahaan memberi tanda keprihatinan terkait dengan reputasi lingkungan dan sosial mereka (Consuelo et al., 2018).

Komite keberlanjutan bertanggung jawab atas prosedur pelaporan informasi lingkungan dan sosial, melaporkan secara berkala kepada dewan direksi tentang hal-hal berkelanjutan yang mempengaruhi perusahaan dan juga mengelola pengungkapan publik tentang isu-isu keberlanjutan (Birindelli et al., 2018). Komite keberlanjutan telah menjadi hal penting dalam tata kelola perusahaan, sebab dapat meningkatkan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, membentuk komite keberlanjutan dipandang sebagai mekanisme penting bagi sebuah perusahaan untuk memaksimalkan pembangunan keberlanjutan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Dewan Direksi Wanita terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan lingkungan dan sosial sangat bergantung pada keputusan manajemen puncak (Monica et al., 2021). Dewan direksi merupakan kunci mekanisme tata kelola perusahaan, sehingga memiliki peran untuk menentukan pengembangan strategi bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial serta dalam hal pengelolaan risiko terkait (Martín, 2019). Keberadaan wanita di dewan direksi dapat membawa perspektif yang berbeda untuk tata kelola dan proses pengambilan keputusan perusahaan (Tingbani et al., 2020). Oleh sebab itu, keputusan yang diambil oleh direktur wanita cenderung lebih sensitif terhadap isu lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan dan kurang berorientasi pada bisnis (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020).

Mengenai masalah lingkungan, wanita memiliki sifat kepedulian yang tulus daripada laki-laki dan cenderung inisiatif untuk mengurangi risiko lingkungan perusahaan (Tingbani et al., 2020). Monica et al. (2021) menyatakan bahwa keberadaan wanita di dewan direksi cenderung kurang agresif, lebih berhati-hati,

dan menghindari risiko yang berdampak pada pengungkapan emisi karbon perusahaan, yang mana sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Menurut teori pemangku kepentingan, keberadaan wanita di dewan direksi memperkuat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder* yang meningkatkan ketertarikan pada tujuan lingkungan dan sosial (Uyar et al., 2021). Direktur wanita dapat meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang peduli dengan masalah lingkungan dan sosial (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dapat memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial dari masyarakat dengan memilih lebih banyak wanita ke dalam dewan mereka, yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan (Elmagrhi et al., 2019). Teori legitimasi berfokus pada keragaman gender dewan direksi dan kinerja lingkungan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat luas atas keputusan yang dibuat, dengan harapan kemungkinan keberlanjutan perusahaan tetap terjaga (Tingbani et al., 2020). Al-Qahtani & Elgharbawy (2020) menyatakan bahwa direktur wanita lebih cenderung khawatir tentang hilangnya reputasi dan legitimasi perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai wanita di dewan direksi akan berpotensi lebih besar untuk menghasilkan pengungkapan emisi gas rumah kaca pada laporan tahunan dan keberlanjutan (Monica et al., 2021). Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa keberadaan wanita di dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020; Elsayih et al., 2015; Hollindale et al., 2017; Monica et al., 2021; Tingbani et al., 2020). Oleh karena itu, direktur wanita lebih mungkin terlibat dalam kegiatan lingkungan serta

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan argumen diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Dewan direksi wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.4.2 Komite Keberlanjutan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Salah satu elemen struktur dewan yang digunakan dalam literatur terbaru adalah keberadaan komite keberlanjutan/CSR/lingkungan (Hussain et al., 2018). Qaderi et al. (2022) menyatakan bahwa keberadaan komite keberlanjutan merupakan mekanisme pemantauan tata kelola yang mampu mempengaruhi kualitas pengungkapan lingkungan dan keputusan pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan. Komite ini mempunyai beberapa tanggung jawab, antara lain mengidentifikasi strategi keberlanjutan perusahaan, meninjau dan memantau kinerja keberlanjutan, menganalisis kebutuhan lingkungan dan sosial, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, mempublikasikan laporan keberlanjutan, meningkatkan tingkat pengungkapan keberlanjutan, dan menjelaskan komitmen keberlanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Qaderi et al., 2022).

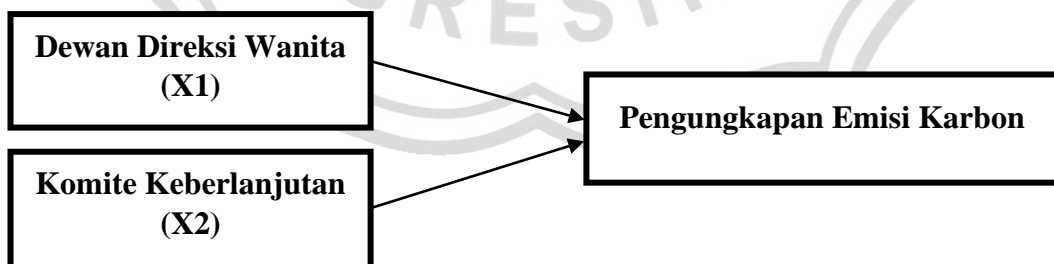
Komite keberlanjutan menanggapi tekanan pemangku kepentingan dengan menunjukkan sifat kepeduliannya terhadap risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan (Martín, 2019). Menurut teori pemangku kepentingan, komite tersebut membantu dewan direksi dalam mengawasi praktik tanggung jawab perusahaan namun mereka juga dapat memainkan peran dalam memantau dan menilai kinerja keberlanjutan perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengelola risiko keberlanjutan (Birindelli et al., 2018). Sejalan juga

dengan premis dasar teori legitimasi bahwa perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap isu pemanasan global dengan menerapkan komite lingkungan untuk mempertahankan legitimasi perusahaan (Michelon & Parbonetti, 2012). Sebuah komite lingkungan didorong oleh motif manajemen reputasi dan legitimasi yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan dan praktik pengukuran serta pelaporan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk pengurangan risiko terhadap pemanasan global (Michelon & Parbonetti, 2012).

Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa keberadaan komite keberlanjutan dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (L. Liao et al., 2015; M. Kolic, 2018). Oleh sebab itu, pembentukan komite yang menangani isu-isu keberlanjutan dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui laporan mereka. Berdasarkan argumen diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual